



APEKSI
ASOSIASI
PEMERINTAH KOTA
SELURUH INDONESIA

Peran Strategis

SEKRETARIS DAERAH **DI MASA TRANSISI** KEPEMIMPINAN DAERAH

Selasa, 31 Oktober 2023

Oleh :

Dr. H. SYARIF FASHA, SE, ME

Walikota Jambi



DR. H. SYARIF FASHA, ME

WALIKOTA JAMBI



PRESTASI
345 AWARD
2013-saat ini

Pendidikan Terakhir : Doktor Ilmu Pemerintahan

Keluarga :

Istri : Hj. Yuliana, SE, M.Si, Ak.CA

*Anak : 1. Syalina Naurah
2. Raehan Syahputra
3. Alm. Muhammad Fabiansyah Putra*

Pengalaman Kerja

Supervisor Engineering	1991-1997
Direktur Utama PT. Bina Konsindo Persada	1998-2009
Owner "Persada Group" (2009-2013)	2009-2013
	2013-2018 dan 2018-2023

WALIKOTA JAMBI

Organisasi

- Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi
- Ketua IMBI Provinsi Jambi
- Ketua Dewan Masjid Kota Jambi
- Ketua IKA POLSRI Indonesia
- Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Representative Council United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC)

TUGAS DAN FUNGSI

UU 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*



SEKDA mempunyai tugas **membantu KDH dalam penyusunan kebijakan** dan **pengoordinasian administratif** terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas, sekda bertanggung jawab kepada KDH.

1. Sekda berperan dari mulai *front* sampai *back office*
2. Mulai dari penyiapan bahan-bahan KDH sampai dengan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
3. Melakukan reformasi internal sehingga organisasi menjadi efektif dan efisien, serta anggaran bisa dialokasikan hal-hal yang produktif
4. Posisi Sekda:
 - Koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah
 - Sinergitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pemerintahan
 - Pengelolaan Sumberdaya Aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana pemerintah daerah
5. **Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana melakukan transformasi peran strategis Sekda sebagaimana Rencana Pembangunan Daerah dalam kerangka pembangunan nasional**



POSISI SEKDA

**DALAM MASA TRANSISI
KEPALA DAERAH SAAT INI**

**Penjabat (Pj) Walikota
diangkat dari JPT Pratama:
(PERMENDAGRI 4 TAHUN 2023)**

- 1. Sekretaris Daerah (Ess II a)**
- 2. Pejabat Ess. II a
dari Pemerintah Provinsi**
- 3. Pejabat Ess. II a
dari Kementerian/Lembaga**

Masa jabatan Pj Walikota 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.



Identity



Vision

LEADER



Solid Communicator

Humor

Ad. 1

**Jika
Pj. Walikota
diangkat dari
Sekretaris Daerah**

**Pasal 14
Permendagri 4 Tahun 2023**

1. **PROSES PEMERINTAHAN BERJALAN LEBIH HARMONIS** (SUDAH LEBIH MENGENAL PEJABAT STRUKTURAL DAN SELURUH ASN TERMASUK FORKOPIMDA);
2. TERDAPAT **KEPASTIAN** DALAM MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH; DAN
3. LEBIH **MENGERTI DENGAN KONDISI WILAYAH** (MASYARAKAT, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN).

**SEHINGGA LEBIH MUDAH UNTUK
MENYUSUN/MELANJUTKAN KEBIJAKAN YANG
SUDAH ADA**

Ad. 2

**Jika
Pj. Walikota
diangkat dari
Eselon II a
Pemerintah Provinsi**

1. DILEMATIS;
2. TIDAK MENGENAL DAN TIDAK DIKENAL OLEH PEJABAT STRUKTURAL MAUPUN ASN TERMASUK FORKOPIMDA DAN MASYARAKAT;
3. SULIT UNTUK MENGENDALIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
4. POTENSI GESEKAN TINGGI;
5. TIDAK MEMAHAMI RAPBD 2024; DAN
6. MEMILIKI MISI TERTENTU (SARAT DENGAN NUANSA POLITIS DAN TITIPAN).

PADA AKHIRNYA RODA PEMERINTAHAN TIDAK BERJALAN EFEKTIF DAN EFISIEN.

Ad. 3

**Jika
Pj. Walikota
diangkat dari
Eselon II a
Kementrian/Lembaga**

1. ***TANPA BEBAN POLITIK;***
2. ***LEBIH DITERIMA OLEH PEJABAT STRUKTURAL DAN ASN SECARA KESELURUHAN DAN DAPAT BERSINERGI SESUAI DENGAN KARAKTER DAN TIPIKAL KEPEMIMPINAN-NYA; DAN***
3. ***DAPAT MENJALANKAN RAPBD 2024 DENGAN DUKUNGAN DARI PERANGKAT DAERAH.***

NAMUN BIASANYA MENJADI BULAN-BULANAN DPRD.



POSISI STRATEGIS

Sekretaris Daerah dan Pj. Walikota

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UU 23
TAHUN 2014
tentang
Pemerintahan Daerah

PP 18
TAHUN 2017
tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD



Besaran Maksimal Hak-Hak Keuangan yang
DIINGINKAN DPRD

KONDISI FISKAL DAERAH

1 FISKAL RENDAH-SEDANG

*Kondisi ini **lebih MUDAH** dalam penentuan besaran hak-hak keuangan DPRD.*

2 FISKAL TINGGI

*Akan **menjadi SULIT**, karena DPRD pasti menginginkan Rate Tertinggi, sehingga akan terjadi tingginya pengalokasian anggaran yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan.*



*Dalam hal ini, Sekda/Pj. Walikota bersama TAPD dapat **meyakinkan DPRD** bahwa Hak Keuangan tersebut tidak terlepas dari **Kemampuan Keuangan Daerah**.*

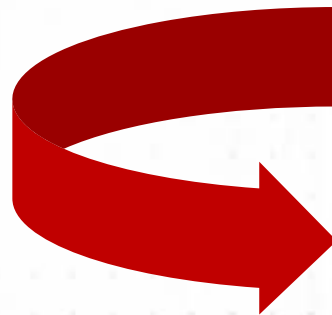


Bagaimana jika *DPRD bersikeras* atau terjadi *deadlock* ???



Lakukan *Lobi* melalui *rapat terbatas* dengan *Pimpinan DPRD*;

Apabila masih belum ada kesepakatan, malah justru bertambah keras atau rapat tidak terkendali, maka **TAPD dapat meninggalkan rapat selanjutnya WALIKOTA dapat menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA sebelumnya.**



UU 23 TAHUN 2014

DPRD DAN KDH DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN.

HUBUNGAN SEKRETARIS DAERAH DAN PJ. WALIKOTA

JIKA SEKDA TIDAK MENJADI PJ. WALIKOTA

- 1** *Tetap fokus dengan tugas dan fungsi*
- 2** *Bersinergi dengan Pj. dalam upaya melanjutkan program pembangunan sesuai dengan prioritas dan target-target daerah Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD)*
- 3** *Menjembatani hubungan dengan DPRD dan Forkopimda termasuk OPD*
- 4** *Menjaga Harmonisasi, kekompakan seluruh ASN dan tenaga pendukung pemerintahan*
- 5** *Terlibat dalam pengawasan dan pengendalian berbagai aktivitas pemerintah daerah*
- 6** *Bertanggung jawab untuk menyusun laporan berkala tentang kinerja pemerintah daerah*



PERPRES 53 TAHUN 2023

*tentang perubahan atas
Perpres Nomor 33 tahun
2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional*

**Berlaku paling
lambat Tahun 2024**

Diturunkan melalui

SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 900.1.15.2/15920/KEUDA
Tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah

- ⦿ Komponen Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain **berpedoman pada PERKADA.**
- ⦿ Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas:
 1. KDH/WKDH, ASN dan Pihak Lain secara **AT COST (Biaya Riil)**
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD secara **LUMPSUM**

Seluruh Komponen Perjalanan Dinas MERUPAKAN BATAS TERTINGGI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERKADA, dengan tetap memperhatikan prinsip EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEPATUHAN, KEWAJARAN DAN AKUNTABILITAS.



SEKDA Menyiapkan **PERKADA** tentang **Standar Satuan Harga** dengan berpedoman pada Surat Edaran, terutama penyesuaian metode pembayaran, besaran dan komponen biaya **Perjalanan Dinas**

UU 1 Tahun 2022

Tentang
Hubungan Keuangan
antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah

POTENSI BAGI DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PAD YANG BERSUMBER DARI

OPSEN PAJAK
BBNKB & PKB

MISALNYA _____



KONTRIBUSI PAD
TERHADAP APBD KOTA JAMBI



**OPSEN
PAJAK**

1. PENINGKATAN PAD
2. MENGURANGI KETERGANTUNG
THD DANA TRANSFER

Sehingga **KEMANDIRIAN FISKAL** Daerah **MENINGKAT**
sejalan dengan semangat Otonomi Daerah

SEKDA selaku KETUA TAPD harus memahami Postur RAPBD dan pengalokasian yang tepat sebagai **BELANJA PEMERINTAH** untuk :

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
- Peningkatan hasil pembangunan, sejalan dengan Pencapaian Target Nasional dan daerah seperti ; Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan dan Pencegahan Stunting, Penurunan Angka Pengangguran dan lain sebagainya



APEKSI
A S O S I A S I
P E M E R I N T A H K O T A
S E L U R U H I N D O N E S I A

**TERIMA
KASIH**



www.instagram.com/fasha_jbi